

PELANGGENGAN DINASTI POLITIK 'SAMAWI' SEBUAH STUDI PERILAKU PEMILIH MODEL PSIKOLOGIS DALAM PILKADA BANTUL TAHUN 2010

Desiana, Rina, Adninda

Abstract

The existence of the elections on the one side it can have a positive effect that is actualized political rights that we have the right to choose and chosen from. But term limits two periods leadership post local autonomy implies limited opportunities for regional heads occupy a strategic position in the region. Consequently born the phenomenon of political dynasties in which the former head of the region trying to put people around him to continue his rule. As well as the phenomenon of political dynasties in Bantul, Idham leadership was replaced by Sri Suryawidati is none other than his wife. Victory Sri Suryawidati not be separated from the influence of political power 'Samawi' where he used the name 'Idha Samawi' as a political tool in order to win votes. He obtained a landslide victory, with 67.77 percent of the vote won. Society tends to choose Idha Samawi on the basis of psychological voting behavior, where they will choose the candidate who has the proximity to a party and feel close to the characters or a specific figure, in this case is 'Samawi'. But further, the existence of political dynasties can hinder the democratic process because it is basically the power is controlled by one person. In addition, aspects of the capabilities and qualities to be a leader tends to ignored.

Keyword: *Political dynasty, psychological voting behavior, figure, capabilities and qualities*

A. PENDAHULUAN

Jatuhnya pemerintahan Soeharto yang ditandai dengan adanya reformasi menjadi tonggak penting dalam berjalannya kehidupan demokrasi di Indonesia. Rakyat yang sudah jenuh dengan otoritarianisme Soeharto meneriakkan dan menggulirkan gelombang demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pada akhirnya Indonesia pun mengadopsi sistem demokrasi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ciri utama pada otoritarianisme yang dijalankan pada masa Orde baru adalah hierarki dan sentralisasi pada satu titik menjadi titik penting dalam pelaksanaan perubahan. Maka dari itu semua hal yang bercirikan otoritarianisme sesegera mungkin harus dihapuskan, dan diganti dengan pola-pola yang menekankan pada otonomi dan kebebasan.

Penggunaan sistem demokrasi di Indonesia salah satunya diwujudkan dengan adanya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan adanya peraturan ini sistem pemerintahan tidak lagi terpusat seperti yang terjadi pada masa orde baru. pemerintahan dijalankan dengan asas desentralisasi dimana daerah mempunyai otonomi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri kecuali lima urusan nasional. Peraturan ini berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah secara hampir menyeluruh, salah satunya dalam hal pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Pada masa orde baru, pemilihan kepala daerah cenderung dikuasai oleh Soeharto, dimana calon kepala daerah harus disetujui oleh Soeharto dan kebanyakan merupakan orang-orang yang menjadi bawahannya. Pada masa itu, kebanyakan kepala daerah hampir semuanya berasal dari kalangan militer, hal ini menunjukkan betapa sentralistiknya pola pemerintahan pada masa itu. Semenjak terjadi otonomi daerah, berdasarkan UU No. 22 tahun 1999, kepala daerah dipilih oleh DPRD, tidak lagi oleh pemerintah pusat. Namun hal ini kemudian menjadi pertimbangan pada penyusunan peraturan pengganti UU No. 22 tahun 1999, hal ini dikarenakan esensi demokrasi di daerah masih kurang terbuka karena belum

adanya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Maka dari itu pada peraturan pengganti tentang pemerintahan daerah, terdapat perubahan dalam pemilihan kepala daerah yang ditunjukkan dengan adanya UU No. 32 tahun 2004. Dalam peraturan baru mengenai pemerintahan daerah ini, kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dipilih secara langsung melalui pilkada.

Adanya peraturan tersebut membawa kehidupan demokrasi di tingkat lokal menjadi lebih demokratis karena rakyat dapat memilih secara langsung pemimpin daerahnya. Namun hal tersebut tidak tanpa resiko, dibalik segala keagungannya dalam menjamin demokrasi lokal, pro kontra terhadap pilkada langsung ini banyak terjadi. Banyak alasan penolakan terhadap mekanisme ini, dari segi ekonomis yang menghabiskan banyak dana, dari segi sosial dimana banyak menimbulkan konflik, dan hal-hal lainnya. Namun apabila dicermati lebih lanjut, ada hal yang cukup menonjol yang bisa diamati dari proses pilkada di Indonesia, salah satunya adalah mencuatnya dinasti politik. Dalam hal ini pilkada tidak hanya sebagai ajang untuk memperebutkan kekuasaan, pilkada juga menjadi cara untuk mendudukkan keluarga dan kerabat kepala daerah untuk mewarisi kepemimpinan di daerah. Semenjak terjadinya pilkada di Indonesia hingga saat ini tercatat ada sembilan dinasti politik yang terjadi dan berupa pewarisan kekuasaan kepala daerah kepada keluarganya. Salah satunya adalah yang terjadi di Kabupaten Bantul, dimana jabatan Bupati yang diduduki oleh Idham Samawi yang menjabat dari tahun 1999-2004 kemudian dilanjutkan dari tahun 2005-2010, dilanjutkan oleh istrinya Sri Suryawidati atau sering disebut Idha Samawi.

Kecenderungan pewarisan politik dalam pola pemerintahan lokal ini berakibat pada pencideraan demokrasi Indonesia. Tidak menjadi masalah ketika keluarga yang menggantikan posisi kepala daerah mempunyai kapabilitas yang cukup untuk melanjutkan pemerintahan. Namun kecenderungan justru menunjukkan bahwa pewarisan dinasti politik ini mengarah pada kelanggengan kekuasaan di daerah. Bisa saja seorang bupati yang menggantikan suaminya dalam hal pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan masih dipengaruhi oleh sang suami. Dalam artian bahwa istri hanya dipergunakan sebagai alat oleh sang suami untuk melanggengkan kekuasaannya. Hal inilah yang menjadi dilema dalam demokrasi lokal, disatu sisi pilkada merupakan mekanisme yang baik dalam aktualisasi kehidupan demokrasi, namun disisi lain terdapat pencideraan demokrasi akibat munculnya dinasti politik yang pada akhirnya hanya bertumpu pada kelanggengan kekuasaan seseorang.

Dengan berdasarkan pemaparan tersebut, menjadi hal yang menarik untuk lebih lanjut mendalami persoalan dinasti politik dalam pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya yang terjadi di Bantul. Tidak hanya karena menciderai demokrasi, namun lebih lanjut juga berkaitan dengan bagaimana rakyat sebagai pemilih mengartikan kondisi dinasti politik ini. Dengan demikian tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan lebih lanjut mengenai dinasti politik yang terjadi di Kabupaten Bantul ditinjau dari segi perilaku pemilih dalam memberikan dukungannya terhadap calon kepala daerah yang mewarisi kekuasaan dari keluarganya. Berkaitan dengan hal tersebut maka tulisan ini akan berpijak atas pertanyaan mendasar mengenai bagaimana terjadinya dinasti politik di Kabupaten Bantul dan mengapa terjadi dinasti politik di Kabupaten Bantul. Lebih lanjut tulisan ini akan diawali dengan perilaku memilih model psikologis sebagai bingkai teori dalam menjelaskan keberlangsungan dinasti politik yang terjadi di Bantul. Selanjutnya dalam tulisan ini akan dipaparkan mengenai deskripsi Kabupaten Bantul dengan disertai penjelasan mengenai berlangsungnya pilkada Bantul dimana

terdapat calon, mekanisme kampanye, dan juga mengenai kemenangan kepala daerah yang terpilih. Secara lebih komprehensif, guna menjelaskan bagaimana keberlangsungan dinasti politik yang terjadi di Kabupaten Bantul maka dalam bagian tulisan ini juga akan dijelaskan mengenai pemerintahan oleh klan Samawi beserta pompa pemerintahannya. Sebagai gambaran nyata terjadinya dinasti politik, maka pada inti tulisan ini akan dijelaskan mengenai majunya Idha Samawi sebagai calon Bupati Bantul pada pilkada tahun 2005 dan tentu saja dikaitkan dengan model perilaku pemilih masyarakat Bantul dalam menghadapi majunya dinasti Politik di Bantul ini. Sebagai catatan akhir, akan dijelaskan mengenai refleksi dari kasus dinasti politik yang ada di Kabupaten Bantul.

A.1. Metode Penelitian

Penelitian ini nantinya akan menggunakan metode studi kasus, hal ini dikarenakan metode studi kasus merupakan metode penelitian yang memfasilitasi eksplorasi dari fenomena dalam konteksnya dengan menggunakan berbagai sumber data. Studi Kasus merupakan strategi yang cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, dan fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata (Yin 1996, hh. 1-18). Pendekatan studi kasus sesuai dengan penelitian ini dikarenakan, pertama, studi kasus cocok untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana, dengan demikian studi kasus cocok apabila digunakan dalam penelitian ini karena pertanyaan penelitian dalam tulisan ini berkaitan dengan bagaimana terjadinya dinasti politik di Bantul dan mengapa terjadi dinasti Politik di Bantul dikaitkan dengan studi perilaku pemilih model psikologis. Selain itu penelitian ini mengangkat permasalahan yang sifatnya kontemporer karena hal ini terjadi pada pilkada Kabupaten Bantul tahun 2010 lalu.

Guna memperoleh gambaran dan data penelitian yang tepat dan komprehensif, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Untuk memperoleh data yang mendalam mengenai dinasti politik wawancara akan dilakukan terhadap masyarakat selaku pemilih dalam pilkada, PDIP sebagai partai pengusung Idha Samawi, dan KPUD sebagai lembaga yang menjalankan proses pilkada. Selain wawancara, observasi juga akan dilakukan guna melihat dan memetakan bagaimana kondisi politik di kabupaten Bantul terkait dengan dinasti politik keluarga samawi. Selain memperoleh data dari wawancara mendalam dan observasi langsung, tulisan ini juga akan dilengkapi dengan data yang bersumber dari studi pustaka. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum data mengkerangkai argumentasi dalam tulisan. Dengan adanya multisumber data dalam penelitian ini, diharapkan data dalam tulisan ini akan mengalami proses triangulasi dan teruji validitasnya, sehingga menghasilkan temuan yang terpercaya dan komprehensif.

A.2. Perilaku Pemilih Model Pendekatan Psikologis, Sebuah Bingkai Teori

Pilihan seseorang dalam menentukan calon atau partai dalam sebuah mekanisme pemilu sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, begitupula alasan seseorang untuk berpartisipasi atau tidak dalam pemilu juga dipengaruhi oleh berbagai macam hal, namun yang menjadi hal penting disini adalah bahwa isu tentang pilihan partai dan alasan pemilihan tersebut menjadi salah satu isu penting dalam mengkaji perilaku pemilih. Secara umum, pendekatan dalam melihat perilaku pemilih dibedakan menjadi tiga, meliputi perilaku pemilih model sosiologis, perilaku pemilih model psikologis dan perilaku pemilih model *rational choice*. Model

sosiologis adalah pendekatan pertama dalam melihat perilaku pemilih, namun karena muncul kritik dan ada beberapa hal yang kurang bisa dijelaskan oleh pendekatan ini dalam melihat perilaku pemilih, maka muncullah model psikologis sebagai salah satu pendekatan dalam melihat perilaku pemilih.

Secara umum, dalam hubungannya dengan *voter turn out*, pemilih yang memiliki jaringan kuat terhadap suatu partai dan mempunyai daya sosial ekonomi lebih baik, bisa saja memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu ketika individu tersebut merasa tidak tertarik. Faktor ketertarikan menjadi hal yang tidak bisa dijelaskan dalam pendekatan sosiologis, dengan demikian, faktor ketertarikan ini kemudian dibingkai dalam kerangka pendekatan psikologis. Model psikologis memperkenalkan apa yang disebut dengan budaya demokrasi atau *civic culture*, dan juga mengenai budaya partisipasi politik untuk menjelaskan tentang partisipasi politik (Almond dan Verba 1963; Verba, Schlozman dan Brady 1995 dalam Mujani, Liddle dan Ambardi 2012, h. 22). Menurut model psikologis, seseorang ikut serta berpartisipasi dalam pemilu dikarenakan ada faktor ketertarikan dengan politik, perasaan dekat dengan partai tertentu, mempunyai informasi untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti dan percaya bahwa keikutsertaannya akan bisa memperbaiki keadaan (Mujani, Liddle dan Ambardi 2012, h. 22) .

Informasi politik merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi perilaku pemilih, karena partisipasi sangat ditentukan oleh pengetahuan pemilih tentang permasalahan publik yang diperoleh dari informasi politik. Seseorang yang mempunyai akses terhadap informasi politik lebih cenderung untuk dapat menentukan sikap dan tindakan politiknya. Terkait dengan informasi politik adalah ketertarikan seorang warga terhadap politik atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum, dengan demikian orang yang tahu mengenai masalah publik menyadari bahwa dirinya penting bagi kepentingan publik dan karena itu kemudian tertarik dengan urusan publik tersebut. Sehingga seseorang akan terdorong untuk bertindak sesuai dengan pandangannya bahwa keikutsertaan dalam memutuskan kepentingan publik tersebut menjadi lebih mungkin dibandingkan kurang tertarik dengan politik (Mujani, Liddle dan Ambardi 2012, h. 24).

Selain berkaitan dengan informasi politik, ketertarikan dengan politik juga berkaitan dengan *political efficacy*, yaitu perasaan seseorang bahwa dirinya mampu memahami dan menentukan keadaan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan bahwa dirinya merasa optimis dan kompeten dalam melihat dan menyikapi masalah-masalah publik yang dihadapi suatu bangsa (Mujani, Liddle dan Ambardi 2012, h. 24). Karena merasa dapat memahami dan mempengaruhi keputusan publik, seseorang memiliki keyakinan bahwa terdapat makna positif dari keterlibatannya dalam pemilu. Dengan demikian keikutsertaannya dalam pemilu dapat memperbaiki keadaan, sehingga sekecil apapun keterlibatannya, pemilih akan tetap tertarik untuk ikut serta berpartisipasi. Hal tersebut yang kemudian mendorong sikap seseorang untuk tertarik dan berpartisipasi dalam pemilu.

Di samping itu, juga terdapat faktor identifikasi partai sebagai salah satu penjelasan model psikologis dalam melihat partisipasi pemilih dalam pemilu. Identifikasi Partai adalah perasaan keterlibatan dan memiliki yang terdapat dalam diri seseorang terhadap sebuah partai politik. Sehingga identifikasi partai ini bisa dikatakan sebagai sikap dan perasaan psikologis yang terdapat di dalam diri seseorang (Eriyanto dkk 2007, h. 18). Dalam faktor psikologis ini terbangun sebuah persepsi dan sikap partisipan seseorang karena proses sosialisasi politik yang dialaminya. Partai politik merupakan salah satu entitas independen yang akan membentuk sentimen dan identitas politik seseorang yang tersosialisasi kedalam

partai politik tersebut. Maka dari itu, identitas partai ini yang menjadi perantara faktor-faktor sosiologis dengan opini dan sikap terhadap partai politik, calon-calon pejabat publik, isu politik terkait, dan keputusan untuk memilih partai atau calon pejabat publik tertentu (Mujani, Liddle dan Ambardi 2012, h. 25).

Sejumlah penelitian tentang perilaku pemilih model psikologis di Indonesia khususnya, menggunakan variabel patron-klien (Gaffar 2002) dan kepemimpinan (Liddle dan Mujani 2000, 2007). Patron klien bisa didefinisikan sebagai hubungan antara seseorang dengan orang yang dihormati. Di Indonesia atau dunia ketiga lainnya, pendapat seseorang dipengaruhi oleh pemuka pendapat (opinion leader) yakni orang yang dihormati dan dimintai pendapat untuk masalah-masalah politik. Menurut Gaffar (1992), keputusan individu untuk mendukung partai tertentu dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan pemimpin yang dihormati oleh seseorang. Pemimpin ini bisa berupa pemimpin formal (pejabat), bisa juga pemimpin informal (ulama atau tokoh masyarakat) (Eriyanto dkk 2007, h. 19).

Sementara kepemimpinan (leadership) adalah penilaian dan kedekatan terhadap tokoh-tokoh yang dikaitkan dengan partai. Liddle dan Mujani (2000, 2007) menyatakan bahwa kepemimpinan/ketokohan (leadership) adalah variabel penting dalam menjelaskan perilaku pemilih di Indonesia. Ketokohan bisa menarik massa pemilih partai politik agar memilih partai dimana tokoh itu berada. Misalnya saja seseorang memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bukan hanya karena partai, tetapi karena ada tokoh Megawati. Penilaian dan kedekatan pada Megawati bisa mendorong pemilih untuk memilih PDIP (Eriyanto dkk 2007, h. 19).

Baik studi Gaffar (1992) maupun Liddle dan Mujani (2000, 2007) menunjukkan identifikasi partai (Party ID) merupakan variabel penting dalam menjelaskan pilihan partai pemilih. Ada hubungan yang kuat antara identifikasi partai dengan pilihan partai, bahwa pemilih yang mengidentifikasi dirinya dengan suatu partai politik, cenderung untuk memilih partai tersebut. Penelitian Liddle dan Mujani (2000, 2007) menunjukkan kepemimpinan (ketertarikan dan evaluasi terhadap tokoh) adalah variabel penting yang menjelaskan pilihan partai pemilih. Dalam penelitian tersebut, aspek ketokohan ini menjelaskan sekitar 71% variasi atas pilihan partai politik.

Sedangkan hasil penelitian Gaffar (1992) mengenai patron klien menunjukkan ada hubungan yang kuat antara identifikasi seseorang dengan tokoh dan pilihan partai. Keputusan individu untuk mendukung partai tertentu dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan para pemimpin. Masing-masing pemimpin memiliki konstituen sosial dan politik sendiri berdasarkan orientasinya masing-masing. Kesimpulannya adalah ketika pemimpin informal sangat berpengaruh dan mampu menghadapi pemimpin formal yang biasanya mendukung partai pemerintah, partai oposisi akan menjadi pemenang dalam pemilu. Dan begitu sebaliknya, ketika peran yang dominan dari pemimpin formal tidak tertandingi, partai pemerintah akan menjadi pemenang dalam pemilu (Eriyanto dkk 2007, h. 20).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model psikologis dalam melihat perilaku pemilih ini mencakup apa yang disebut sebagai identifikasi diri dengan partai politik atau identitas partai, opini tentang isu-isu atau kebijakan publik dan juga opini tentang kualitas kepribadian tokoh-tokoh partai atau calon yang bersaing. Hal-hal ini pula yang menjadi pendekatan dalam melihat perilaku pemilih di Indonesia saat ini, seperti identifikasi partai dan faktor kepemimpinan, yang kemudian menjadi salah satu faktor kuat dalam menjelaskan alasan pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dimana pada kenyataannya faktor identifikasi partai

dan kepemimpinan ini menjadikan pemilih menjadi ikut berpartisipasi dan memilih calon atau partai, meskipun disisi lain dari segi rasional kurang memadai.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah mencuatnya dinasti politik dalam kepemimpinan daerah di Indonesia pasca otonomi daerah. Dimana apabila hal tersebut dijelaskan dengan pendekatan model psikologis dalam melihat perilaku pemilih, terdapat faktor identifikasi partai yang sudah mengakar dalam diri masyarakat. Disisi lain, juga ditopang oleh faktor-faktor seperti kepemimpinan, dimana rakyat sudah percaya dengan kualitas kepemimpinan seseorang, maka akan percaya pula apabila kepemimpinan itu dilanjutkan oleh anggota keluarganya maka sistem kepemimpinan yang dilakukan adalah sama.

B. PEMBAHASAN

B.1. Kabupaten Bantul dan Proses Pilkada, Sebuah Gambaran Singkat Permasalahan

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari empat kabupaten yang termasuk dalam wilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun. Luas Kabupaten Bantul 508,85 km² atau 15,9 % dari luas wilayah DIY, dengan jumlah penduduk sebesar 921.263 jiwa pada tahun 2011 (BPS Bantul 2011, h. 8).

Secara administratif Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang bupati, dimana bupati pertama adalah Raden Tumenggung Mangun Negoro yang memimpin semenjak 20 Juli 1831. Pasca reformasi atau tepatnya tahun 1999, Bantul memiliki Bupati baru yaitu Idham Samawi yang menjabat mulai tahun 1999 hingga 2004. Pada Desember 2004 hingga Januari 2005, jabatan bupati dipimpin oleh Drs. Mujono NA sebagai pelaksana tugas harian. Pada tahun 2005, terlaksana pilkada langsung pertama kali di Kabupaten Bantul dalam pilkada tersebut, Idham Samawi menjadi pemenang sehingga ia kembali menjabat sebagai bupati Bantul dari tahun 2005 hingga 2010. Pada tahun 2010, kembali dilaksanakan pilkada untuk memenuhi jabatan bupati Bantul selanjutnya.

Pada pilkada tahun 2010 ini, ada fenomena menarik, dimana salah satu calon Bupati adalah istri dari Idham Samawi yaitu Sri Surya Widati atau Idha Samawi. Pada pilkada Bantul tahun 2010 tersebut, terdapat tiga calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang meliputi Kardono-Ibnu Kadarmanto, Sri Surya Widati-Sumarno dan Sukardiyono-Darmawan. Pasangan Nomor urut pertama atau Kardono-ibnu Kadarmanto merupakan calon independen, sedangkan pasangan Ida Samawi dan Sumarno diusung oleh PDIP, Golkar, PAN, dan PKPB dan pasangan Sukardiyono-Darmawan diusung oleh partai Demokrat dan PKS (Kompas,2010).

PDIP memiliki alasan tersendiri untuk mengusung Idha Samawi sebagai calon kandidat Bupati Bantul. Menurut salah satu kadaer DPP PDIP Kabupaten Bantul yaitu Bapak Arjun (2012, komunikasi personal, 2 Januari) mengatakan bahwa aspirasi dari masyarakatlah yang menginginkan Ida Samawi melanjutkan kepemimpinan suaminya. Berdasarkan rapat yang diselenggarakan secara demokratis dan terbuka, pada level paling bawah yaitu rapat ranting ditingkat desa, sebanyak 75 desa menginginkan bahwasanya Idha Samawi menjadi Bupati Bantul untuk periode 2010-2015. Rapat itu dilanjutkan ke tingkat kecamatan, dimana sebanyak 17 kecamatan juga menginginkan Idha Samawi maju menjadi Bupati Bantul. Sedangkan pada Rapat Kerja Cabang Khusus tingkat Kabupaten,

diputuskan bahwa Sri Suryawidati menjadi calon kandidat yang akan maju dalam Pemilukada Kabupaten Bantul ditemani dengan Drs H Sumarno sebagai calon wakil Bupati Bantul. Di samping masyarakat menginginkannya, Idha Samawi juga telah mendapat rekomendasi dari DPP PDIP. DPP sendiri mengusung Ida Samawi berdasarkan dinamika politik yang ada yaitu tuntutan masyarakat, survei internal partai dan visi misi Idha Samawi yang memang mengaspirasikan kepentingan masyarakat arus bawah, dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat Bantul menuju Bantul Projo Tamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis.

Pilkada Bantul dilaksanakan 23 Mei 2010, tiga bulan sebelum berhentinya masa kepemimpinan bupati terdahulu. Pencalonan Idha Samawi ditengarai sebagai upaya pelanggengan dan pewarisan kepemimpinan dari klan Samawi, meskipun dari pihak internal calon meneriakkan bahwa pencalonan Idha dikarenakan dukungan dari masyarakat Bantul. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bantul pada tahun 2010 tidak dilalui dengan mudah, dalam proses kampanye banyak sekali tindakan dari masing-masing calon yang dengan keras berusaha menarik perhatian pemilih. Namun apabila dicermati lebih lanjut terlihat bahwa hanya pasangan Sri Surya Widati-Sumarno dan Sukardiyono-Darmawan atau pasangan nomor urut dua dan tiga. Pasangan no urut satu atau Kardono-Ibnu Kadarmanto terlihat lebih pasif dan kurang gencar dalam proses kampanye. Dalam hal pembiayaan kampanye, kubu Sri Surya Widati-Sumarno atau disingkat Idaman, menghabiskan biaya kampanye tertinggi yaitu senilai 1,2 Milyar, sedangkan pasangan Kardono-Ibnu Kadarmanto (Karib) sebesar Rp 13,7 juta dan pasangan Sukardiyono-Darmawan (Sukadarma) sebesar Rp 20,3 juta (Kompas, 2010). Dalam proses kampanye ini dua kubu pasangan nomor urut dua dan tiga sangat aktif melakukan penyerangan dan saling sindir. Begitupula dalam debat yang dilaksanakan oleh KPUD, dimana kedua kubu ini saling menyerang satu sama lain.

Terlepas dari pro kontra pewarisan kekuasaan klan Samawi, pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul mengumumkan bahwa pasangan Sri Surya Widati-Sumarno mendapatkan suara 67,77 persen dari total pemilih 691.982, sehingga otomatis menjadi pemenang dalam pilkada tersebut dengan suara terbanyak di kecamatan Sewon (36.919) dan terendah di kecamatan Piyungan (15.667), dimana sebagian besar pendukungnya (56%) adalah petani. Diurutan kedua adalah pasangan calon Sukardiyono-Darmawan Manaf yang meraih 137.888 suara atau 28,26 persen. Sedangkan posisi terakhir ditempati Kardono-Ibnu Kadarmanto yang hanya meraih sebanyak 19.374 suara atau 3,97 persen dari suara keseluruhan (Tempo, 2010).

B.2. Majunya Idha Samawi dalam Pemilukada Bantul 2010: Sebuah Pelanggengan Dinasti Politik

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa Idha Samawi merupakan istri dari mantan Bupati Bantul yang bernama Idham Samawi. Majunya Idha sebagai bupati Bantul dapat diamati sebagai proses pelanggengan dinasti politik yang dibangun oleh keluarga Samawi. Klan Samawi merupakan salah satu klan yang berpengaruh dalam perpolitikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana kita tahu bahwa Samawi merupakan pendiri 'Kedaulatan Rakyat', yaitu sebuah koran lokal yang notabene menjadi konsumsi mayoritas warga di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Akibatnya media tersebut memiliki pengaruh dalam pembentukan opini publik terhadap sebuah fenomena. Tak ayal jika media massa dapat dimanfaatkan dalam kemenangan kandidat.

Di samping merupakan pemilik koran terbesar di DIY-Jateng, nama 'Samawi' juga melekat pada anaknya yaitu Idham Samawi. Idham Samawi kini menjadi salah satu pimpinan dari Persiba Bantul. Persiba merupakan klub sepakbola yang mampu menyedot animo golongan muda di Bantul. Klub olahraga ini dinilai menjadi salah satu objek yang mendapat kucuran dana APBD yang banyak, dengan dalih sebagai sarana pengembangan olahraga (Sukanti 2012, komunikasi personal 21 Desember). Namun hal yang menarik pula adalah Persiba juga mampu menjadi daya tarik bagi pemilih pemuda. Hal ini disebabkan oleh kedekatan personal antara pemuda, Persiba, dan Pak Idham sehingga para golongan muda menaruh legitimasi pada Idham Samawi, termasuk Idha 'Samawi'.

Jika dianalisa lebih mendalam, kemenangan telak Idha Samawi sebesar 67,77 persen bukanlah merupakan hal yang dianggap sepele. Sekian pemilih yang memilih Idha sebagai pemimpin bukanlah tanpa sebab. Jika dilakukan analisa lebih lanjut, fenomena ini terjadi karena adanya dimensi psikologis yang berperan dominan dalam hal ini. Realitas ini dapat dikerangkai dengan pendekatan perilaku memilih model psikologi. Perilaku ini mengasumsikan bahwa seseorang akan berpartisipasi dalam pemilihan disebabkan oleh adanya dimensi psikologis yaitu faktor ketertarikan dengan politik, perasaan dekat dengan partai atau figur tertentu, mempunyai informasi untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti dan percaya bahwa keikutsertaannya akan bisa memperbaiki keadaan secara umum (Mujani, Liddle dan Ambardi 2012, h. 22).

Sebagaimana studi lapangan yang telah dilakukan peneliti, mayoritas masyarakat memang memilih Idha Samawi sebagai bupati karena adanya dimensi psikologis yang kuat. *Pertama*, yaitu adanya perasaan dekat dengan sosok 'Ibu' Idha Samawi. Pada kampanye yang dilakukannya, Idha dibantu oleh adanya jaringan politik perempuan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Indonesia DIY. Koalisi perempuan memiliki balai perempuan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota, tidak terkecuali di Bantul. Melalui inilah, KPI memfasilitasi Idha untuk bertemu dengan konstituennya. Proses inilah yang membuat Idha memiliki hubungan yang semakin dekat dengan pemilihnya. Di sisi lain, KPI juga dengan gencar mengkampanyekan Idha sebagai sosok 'Ibu' yang memiliki sisi keibuan yang begitu kental (Sukanti 2012, komunikasi personal 21 Desember). Kampanye yang begitu kuat ini rupanya mampu mempengaruhi perasaan pemilih, dimana ada dimensi 'ibu' yang melekat pada diri Idha. Alhasil Idha memperoleh dukungan yang banyak dari gerakan perempuan dan juga masyarakat karena dianggap mampu menjadi Ibu yang baik bagi Kabupaten Bantul.

Selain dinilai sebagai 'ibu' bagi masyarakat Bantul, Idha merupakan sosok yang kharismatik. Hal ini diungkapkan oleh Agus Riyadi (2013) seorang warga Dusun Gerselo yang memilih Idha pada pilkada 2010 lalu. Ia menilai bahwa ibu Idha merupakan sosok yang pantas memimpin rakyat Bantul karena kepandaian dan kepiawaiannya dalam memimpin. Di samping itu, beliau dinilai sebagai sosok yang jujur dan amanah dalam mengemban tugas. Berdasarkan kelebihan dan sifat baik yang melekat pada diri Ibu Idha, terlihat dengan jelas akan karisma yang dimilikinya. Atas dasar ini pula masyarakat Bantul banyak yang memilih Idha Samawi sebagai kepala daerahnya.

Terpilihnya Idha Samawi dalam pilkada Bantul 2010 tidak dapat dilepaskan dari dimensi psikologis para pemilihnya. Salah satu dimensi lain yang terlihat dari realitas ini adalah adanya keyakinan bahwa Idha mampu melanjutkan Program Kerja Bapak Idham Samawi. Sebagaimana kita tahu bahwa selama memimpin, Idham memiliki serangkaian kebijakan yang dinilai populis. Kebijakan-kebijakan ini telah

membawa Kabupaten Bantul menjadi salah satu Kabupaten yang mendapatkan julukan *best practice* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan tersebut meliputi (Wibawa & Juwari 2011, hh 115-116), *pertama*, proteksi petani. Ketika menjabat sebagai Bupati tepatnya pada tahun 2003, Idham Samawi membuat kebijakan pertanian yang melindungi petani dari gejolak harga pasar. Ia memproteksi komoditas utama pertanian, yaitu padi, jagung, bawang merah, kacang tanah, cabai, kedelai. Kebijakan ini dituangkan dalam SK Bupati No. 12A tahun 2003 tentang Kebijakan Pertanian di Bantul. Kebijakan ini memberlakukan hal yang sama seperti Bulog yaitu membeli hasil pertanian dengan harga normal ketika harga jual hasil pertanian sedang rendah yang diakibatkan adanya panen raya. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan petani tidak akan merugi akibat anjloknya harga hasil panen. Selain menerapkan kebijakan tersebut, dalam upaya memberdayakan petani Pemkab Bantul berusaha membangun kemitraan dengan pihak swasta untuk mengembangkan produk pertanian organik. Pihak swasta ini yang kemudian membeli hasil pertanian organik petani dan mengembangkan produk pertanian yang lebih unggul, sehingga petani memperoleh hasil pertanian yang lebih banyak dibandingkan metode pertanian yang konvensional.

Kedua, kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Selain sektor pertanian dan perdagangan, di Bantul juga terdapat banyak sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yakni 17.799 buah atau sekitar 23,6% dari 74.941 total UKM di DIY pada tahun 2005 (Perindakop DIY dalam Purwanto, 2006). Kebijakan pro rakyat yang digulirkan Pemkab Bantul adalah menggalakkan sektor ini bersama dengan pariwisata pada tahun 2008. Kabupaten Bantul membangun sentra pariwisata Gabusan, Manding dan Tembi (GMT) untuk memasarkan produk-produk UKM. Ini menggabungkan kawasan wisata utama yaitu Gabusan dengan pasar kerajinan, Manding dengan kerajinan kulit dan Tembi dengan rumah budaya. Tapi tampaknya hingga saat ini Pasar Seni Gabusan sebagai ikon baru GMT perlu banyak dibenahi karena tampaknya tidak berhasil menarik lebih banyak wisatawan.

Terakhir, adanya kebijakan pelarangan *mall*. Kebijakan pelarangan *mall* di Bantul bertujuan untuk melindungi pedagang-pedagang pasar tradisional agar tidak terpinggirkan. Kebijakan larangan pendirian *mall* ini termuat dalam Peraturan Bupati No. 12 tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern. Bupati menilai, bahwa keberadaan 56 pasar tradisional di Bantul sangatlah menguntungkan bagi seluruh warga karena itu keberadaan pasar tradisional harus dipertahankan (Kedaulatan Rakyat, 2010). Bantul merupakan satu-satunya kabupaten di antara lima kabupaten/kota di DIY yang melarang keberadaan *mall*. Dalam Perbup tersebut termuat pula ketentuan lain, misalnya luas toko maupun keharusan untuk bermitra dengan usaha kecil dan koperasi.

Berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut dinilai positif oleh masyarakat Bantul. Untuk itu, majunya Idha Samawi dinilai sebagai langkah positif untuk meneruskan 'kebaikan' Bapak Idham. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang pemuda bernama Jalu Pamungkas (2013), yang notabene memilih Idha agar ia meneruskan proker Bapak Idham.

Berbagai pemaparan di atas menunjukkan bahwa dimensi psikologis berperan sangat kental dalam kemenangan Idha. Berbagai harapan masyarakat terlihat dengan jelas, seperti 'ibu yang mengayomi', sang penerus kebijakan pro rakyat, serta sosok karismatik terlekat pada dirinya. Hal ini jelas berimplikasi pada kemenangan telak yang diraih olehnya.

Melalui pemaparan di atas terlihat bahwa konteks ketokohan berperan dominan. Kualitas tokoh, pembawaan tokoh, program yang diusung oleh tokoh

sangat berpengaruh. Pada realitas ini, nama 'Samawi' menjadi nama keberuntungan yang diusung oleh Idha. Di samping itu, realitas ini menggambarkan adanya budaya demokrasi (*civic culture*) yang telah berkembang di Bantul. Masyarakat memiliki pertimbangan yang matang mengenai sosok pemimpin yang diinginkannya.

Realitas yang telah dipaparkan sebelumnya membuat kita tidak bisa menutup mata bahwa memang telah terjadi pelanggaran dinasti politik 'Samawi'. Bila ditinjau dari demokrasi prosedural, realitas ini tidak menjadi sebuah permasalahan. Pada pilkada Bantul tahun 2010 terdapat tiga pasang calon yang berkontestasi. Selain itu, pemilihan juga dilakukan oleh rakyat secara langsung. Hal ini secara prosedural tidak menjadi masalah karena terdapat peluang bagi semua pihak untuk berkompetisi, dan di satu sisi memberi kesempatan rakyat untuk memilih kandidat yang diinginkannya. Akan tetapi, terlihat dengan jelas bahwa sirkulasi elit tidak berjalan secara maksimal karena kursi kepemimpinan hanya berputar pada satu titik. Secara politis hal ini menunjukkan adanya pemusatan kekuasaan pada orang-orang tertentu yang memiliki ikatan darah dengan Samawi. Ketika kekuasaan berputar pada satu titik, maka kewenangan sebagai kepala daerah menjadi lahan yang sangat politis. Bupati mampu mendistribusikan sumberdaya kepada orang-orang yang loyal kepadanya. Sedangkan lawan politik dimungkinkan tidak mendapat apapun dari sang bupati. Pada titik inilah terlihat bahwa sumberdaya menjadi instrumen untuk membangun dan memelihara loyalitas. Jika hal ini terus menerus berjalan, kepentingan rakyat rawan untuk diboncengi oleh para pengabdian sang bupati. Dengan demikian kepentingan rakyat akan mudah untuk digadaikan oleh pemimpin.

Berbagai uraian di atas menunjukkan adanya dimensi psikologis yang berperan dalam perilaku memilih rakyat Bantul. Akan tetapi di sisi lain kami juga menyadari akan kelemahan analisa perilaku pemilih model psikologis. Analisa berbagai hal tersebut terlihat menggeneralisasikan dan menganggap politik berjalan secara statis. Nama 'Samawi' dinilai menjadi pondasi utama kemenangan Idham maupun Idha, akan tetapi tidak disadari pula bahwa politik senantiasa mengalami dinamika. Bisa saja mereka memilih kandidat tersebut karena dinilai menguntungkan individu para pemilih. Pertimbangan untung rugi atas kinerja partai politik dan kandidat juga bisa menjadi pertimbangan seseorang untuk memilih.

B.3. Sebuah Refleksi: Dinasti Politik Menghambat Proses Demokrasi

Menurut Ari Dwipayana (Pengamat Politik UGM), dalam 14 Tahun terakhir ini terjadi fenomena pelokalan politik. Pada kondisi ini timbul pemimpin lokal baik yang berbasis pengusaha, ada juga tokoh-tokoh yang mempunyai kharisma kemudian maju sebagai Bupati. Ketika pemimpin lokal ini menjalankan praktek pemerintahannya, awalnya mereka akan merasakan gejolak politik, konfigurasi politik yang penuh dinamika di tingkat lokal. Akan tetapi ketika periode kedua biasanya mereka mengukuhkan kekuasaan mereka melalui kebijakan-kebijakan populis yang berpihak kepada rakyat, dengan kebijakan populis tersebut mereka akan menjadi idola baru di daerah, sehingga mereka menjadi pemimpin yang terkesan baik dimata masyarakat. Kecenderungan pola politik lokal ini semakin diperkuat dengan adanya peraturan mengenai pemerintahan daerah yang kemudian menjadi pedoman dalam menjalankan politik di level lokal. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai mekanisme dalam memperoleh jabatan sebagai kepala daerah, selain itu juga dijelaskan adanya pembatasan periode kepemimpinan kepala daerah yaitu hanya dua periode. Peraturan ini pada dasarnya bertujuan untuk memperlancar proses demokratisasi di level local. Namun hal ini juga menjadi

permasalahan tersendiri bagi penguasa daerah dalam hal ini kepala daerah. Hal ini dikarenakan pembatasan masa jabatan tersebut mengakibatkan kegagalan dalam upaya melanggengkan kekuasaannya. Hal yang kemudian dilakukan adalah dengan jalan mewariskan kekuasaannya tersebut kepada orang-orang terdekatnya agar penguasa tersebut tetap dapat mengontrol jalannya pemerintahan di suatu daerah. Warisan inilah yang kemudian disebut dengan dinasti politik, yang merupakan bentuk kepemimpinan authoritarian, diktator, di mana negara dijalankan sesuai kehendak pribadi pemimpin negara (*personal rule*) kemudian masyarakat mencari figur-figur yang kira-kira bisa mewakili untuk mewakili pemimpin yang lama.

Hal tersebut pada akhirnya mendorong adanya identifikasi calon pemimpin yang memiliki hubungan terdekat dengan sang idola, entah istrinya, anaknya, atau keluarga dekatnya, tujuannya adalah agar mereka tetap memiliki kontrol terhadap pemerintahan dan praktek politik di daerahnya. Alasan keinginan rakyat untuk menjadikan calon-calon diatas menjabat ditanggapi sebagai "proses pengkondisian secara politik", modus kontruksi politik melalui idealisme yang terbentuk dalam masyarakat maupun modus politik atau manuver politik elit yang ingin tetap kokoh mempertahankan kekuasaannya, salah satunya dengan cara mewarisi kekuasaannya pada keluarganya. Itulah salah satunya yang terjadi di Bantul.

Secara umum, adanya dinasti politik dalam suatu proses pemerintahan dapat menghambat jalannya proses demokrasi (Bathoro 2011, hh 118-120). Hal ini dikarenakan, *pertama*, dinasti politik menutup peluang bagi munculnya proses-proses politik yang demokratis, terutama figur-figur alternatif yang mungkin lebih baik. Karena bagaimanapun kemudian dengan politik pewarisan secara biologis ini tentu akan menutup peluang kandidat lain walaupun memiliki kompetensi dan kualitas yang sangat baik untuk menjadi seorang pemimpin. Hal ini berarti, dinasti politik akan menjadi hambatan serius bagi terealisasinya hak-hak politik rakyat yang seharusnya memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan memanfaatkan jabatan politik. *Kedua*, politik dinasti mengabaikan prinsip-prinsip pemilihan umum yang adil. Para kerabat yang menggantikan posisi incumbent sudah pasti akan mengambil manfaat, sekurang-kurangnya popularitas. Sebagaimana kita tahu bahwa Sri Suryawidati menggunakan nama 'Idha Samawi' agar setidaknya mirip dengan nama sang suami yang notabene menjabat bupati periode sebelumnya. Di samping itu, ia juga menonjolkan nama 'Samawi' agar publik mengenalnya sebagai sosok yang dekat dengan Samawi. Pemanfaatan yang paling berbahaya terjadi jika otoritas dan fasilitas incumbent disalah gunakan secara maksimal untuk memenangkan para kerabat. *Ketiga*, politik dinasti juga bisa merusak sistem kaderisasi partai politik. Penguatan institusionalisasi politik kepartaian menjadi terhambat karena peluang kader-kader terbaik partai diambil alih para kerabat yang baik dari segi kuantitas kaderisasi maupun kualitas sebenarnya bisa saja belum memenuhi persyaratan. Seperti halnya yang terjadi di Bantul, dimana Idha menggunakan nama 'Samawi' untuk mendulanh suara. Inilah salah satu faktor yang membuat PDIP yakin untuk mengusung Idha, karena ia memiliki popularitas yang tinggi. *Keempat*, dinasti politik dapat menyebabkan "tersetir"-nya kebijakan yang harus diambil pemerintah demi langgengnya kekuasaan satu-dua kelompok tertentu, dimana hal ini berdampak pada semakin tercermarnya proses demokrasi. Aktor politik dan kebijakan yang ada, sulit untuk dipastikan terbebas dari kepentingan sebagian golongan bahkan orang perorangan. Seperti halnya yang terjadi di Bantul, dimana kebijakan juga disetir oleh sang suami. Dapat dilihat bahwa terdapat alokasi anggaran yang besar untuk sektor sepakbola. Hal ini jelas merupakan program titipan sang suami, mengingat sang suami kini menjabat

sebagai petinggi klub Persiba Bantul (Sukanti 2012, wawancara personal, 21 Desember). *Kelima*, tradisi dinasti ini akan semakin membuka dan memperbesar "celah" bagi Korupsi-Kolusi-Nepotisme dan lebih jauh dinasti politik mampu mengubah tekstur demokrasi sedemikian rupa sehingga bukan lagi sebagai ruang kontestasi ide, gagasan, program dan ideologi, melainkan pasar transaksi jual-beli kepentingan individu dan kelompok-kekerabatan.

Fenomena dinasti politik di Kabupaten Bantul menyadarkan kita bahwasanya salah satu cara elit untuk mengontrol proses pemerintahan dan mempertahankan kedudukan ialah dengan cara mengangkat kerabat dekat yaitu sang Istri untuk menggantikan kepemimpinan suaminya. Namun hal ini bila terus menerus dilanjutkan dapat menghambat laju demokrasi. Sebagai negara yang demokratis, sudah seharusnya negara kita memiliki berbagai tipe kepemimpinan yang unggul. Hal ini didapatkan dari hasil kepemimpinan masing-masing elit yang memegang tampuk kekuasaan. Rakyatlah yang mengevaluasi kebaikan dan kelebihan setiap pemimpin lalu meramunya sehingga dapat dijadikan rekomendasi untuk kepemimpinan selanjutnya. Adanya praktik dinasti dalam berpolitik hanya akan menyajikan gaya kepemimpinan yang sama saja dari sebelumnya. Seperti halnya kebijakan populis di Kabupaten Bantul, dimana banyak kebijakan yang sudah diusung Idham Samawi diusung kembali oleh istrinya, sehingga kebijakan yang dihasilkan pun akan sama saja. Disisi lain, Idha Samawi menyatakan bahwasanya Idham Samawi meskipun tidak lagi menjabat sebagai Bupati, namun Idham selama ini selalu menjadi aktor dibalik kebijakan-kebijakan yang diambil Idha Samawi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengendalian kekuasaan oleh orang yang berusaha tetap menguasai Kabupaten Bantul yaitu Idha Samawi melalui istrinya yang menjadi Bupati. Implikasi lebih jauh dari praktik dinasti politik yang terjadi di Kabupaten Bantul maupun di daerah lainnya dapat mengamputasi regenerasi kepemimpinan yang lebih meluas. Kita akan kesulitan melahirkan pemimpin dari kalangan rakyat biasa meskipun ia memiliki pemahaman politik yang baik karena semua pos vital dan strategis telah terisi oleh keluarga politikus sebelumnya. Tentu saja dalam hal ini, aspek kapabilitas dan kualitas dalam memilih pemimpin cenderung terabaikan.

C. PENUTUP

Berubahnya haluan proses pemerintahan Indonesia dari otoriter menjadi demokrasi menyebabkan adanya berbagai perubahan dalam berbagai sektor kehidupan, salah satunya dapat terwujud dalam proses politik lokal. Semenjak bergulirnya otonomi daerah, penyelenggaraan proses pemerintahan di daerah diklaim lebih demokratis mengingat kepala daerah tidak ditunjuk oleh pusat namun sudah diserahkan kepada pilihan rakyat. Pada awalnya kepala daerah dipilih dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD, namun semenjak tahun 2004 kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui proses pilkada. Selain adanya peraturan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah, terdapat pula pengaturan dalam pembatasan masa jabatan kepala daerah dimana kepala daerah menjabat maksimal dua periode. Hal tersebut berdampak pada adanya kekecewaan dari para penguasa lokal saat mereka tidak bisa melanggengkan kekuasaannya. Hal yang dilakukan kemudian adalah dengan menggunakan orang-orang disekitarnya untuk meneruskan dan mewarisi kekuasaan mantan kepala daerah. Fenomena ini yang terjadi di Kabupaten Bantul dalam proses Pilkada tahun 2010, dimana terdapat calon bupati yaitu Idha Samawi yang merupakan istri dari bupati Bantul periode sebelumnya. Pencalonan Idha ini ditengarai sebagai proses pelanggengan

kekuasaan klan 'Samawi' di Bantul. Kemenangan Idha dalam pilkada Bantul tidak bisa dilepaskan dari pengaruh keluarga Samawi dalam dirinya, banyak masyarakat yang sudah terpengaruh bagaimana kebaikan sosok Idham Samawi ketika menjadi bupati dengan kebijakan-kebijakan populisnya. Sehingga masyarakat menganggap bahwa dengan memilih Idha maka mereka akan mendapatkan pemimpin yang sama dengan Idham Samawi. Selain itu figur Idha yang dianggap keibuan, perhatian dan sosok idaman bagi masyarakat juga mempengaruhi psikologis pemilih untuk memberikan dukungannya kepada Idha. Dengan demikian, model perilaku pemilih dalam pilkada ini bisa disimpulkan sebagai model psikologis mengingat kecenderungan memilih karena adanya konteks ketokohan yang berperan dominan. Terlepas dari hal tersebut, adanya dinasti politik di Kabupaten Bantul ini pada dasarnya mengganggu jalannya demokrasi di level lokal, yang ditunjukkan dengan adanya penyetiran dalam pengambilan kebijakan, ketidakadilan dalam proses pemilihan kepala daerah karena tidak mampu mengadaptasi proses regenerasi kepemimpinan, sehingga kepala daerah terpilih bisa jadi tidak mempunyai kapabilitas dan kualitas yang baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Bathoro A, 2011, 'Perangkap dinasti politik dalam konsolidasi demokrasi', Jurnal Fisip UMRAH, Vol. 2, No. 2, hh. 115-125.
- Eriyanto dkk 2007, *Preferensi dan Peta Dukungan Pemilih Pada Partai Politik*, Lingkaran Survei Indonesia, Jakarta.
- Kompas 2010, *Dana Kampanye Idaman Terbanyak*, <<http://regional.kompas.com/read/2010/05/07/18155323/Dana.Kampanye.Idaman.Terbanyak-14>>, dilihat 2 Januari 2013, pukul 08.08 WIB.
- Mujani, Liddle dan Ambari 2012, *Kuasa Rakyat : Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*, Mizan Publika, Jakarta.
- Riza, AH 2011, 'Demokrasi dalam politik dinasti'.
- RW 2011, 'Hj Sri Suryawidati wanita pertama DIY jadi Bupati', Gemari, edisi 134, tahun XIII, Maret 2012.
- Sukanti, Pengurus Koalisi Perempuan Indonesia, wawancara 21 Desember 2012
- Tempo.com 2010, *Sri Surya Widati-Sumarno Menangkan Pilkada Bantul*, <<http://www.tempo.co/read/news/2010/05/27/177250860/Sri-Surya-Widati-Sumarno-Menangkan-Pilkada-Bantul>>, dilihat 2 Januari 2013, pukul 08.29 WIB.
- Wibawa, S & Juwari, A 2011, 'Kebijakan populis pemerintah kabupaten bantul', Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011, Lab Ane Fisip, Unitra.

Wawancara :

- Arjun, kader DPP PDIP Kabupaten Bantul, wawancara 2 Januari 2013.
- Pamungkas, Jalu, Warga Dusun Patalan Patalan Jetis Bantul Yogyakarta, wawancara 10 Januari 2013.
- Riyadi, Agus, Warga Dusun Gerselo Patalan Jetis Bantul Yogyakarta, wawancara 11 Januari 2013.